

ABSTRAK

Ahmad Ghifari Assidiqi, NIM. 121303008, (2025) : *Model Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Terhadap Kebijakan Larangan Study Tour Berdasarkan Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA Perspektif Siyasah Dusturiyah.*

Penelitian ini mengkaji kebijakan larangan *study tour* yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Kebijakan ini melarang kegiatan *study tour* yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pendidikan dan berpotensi membebani ekonomi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis model kepemimpinan Dedi Mulyadi, kedudukan hukum surat edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kedudukan Surat Edaran Gubernur dalam hirarki peraturan perundang-undangan, menganalisis bentuk kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam kebijakan larangan *study tour*, serta mengkaji keselarasan tindakan kepemimpinan tersebut dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori negara hukum, teori kepemimpinan dan teori *masalah mursalah* yang diintegrasikan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa model kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam kebijakan larangan *study tour* merefleksikan orientasi kemaslahatan publik, meskipun secara administratif masih menyisakan problem kewenangan dan partisipasi publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian bersifat kualitatif, diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah daerah, serta literatur terkait kepemimpinan dan hukum tata negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA secara yuridis tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan bersifat kebijakan administratif (*beleidsregel*). Kebijakan ini mencerminkan model kepemimpinan yang memadukan kepemimpinan transformasional dan populis-karismatik yang berorientasi pada pembentukan karakter dan pemberdayaan lokal. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah* kebijakan ini sejalan dengan prinsip *masalah al-'ammah*, khususnya pada aspek *hifdzu maal*, *hifdzu nafsi*, dan *hifdzu 'aqli*, namun masih memerlukan penguatan aspek musyawarah, partisipasi publik, serta tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci : *Model Kepemimpinan, Kebijakan, Surat Edaran, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, Mashlahah Mursalah, Siyasah Dusturiyah*